

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, Liberty. Ghalia Indonesia.

Josef Riwu, 2002, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet VI.

Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, 2014, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Nuansa Cendekia.

Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Paulus E. Lotulung, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, hlm.22

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

S.F Marbun & M. Mahfud. MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty.

Sjachran Basah , 1995, *Pencabutan Izin sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Surabaya, FH UNAIR..

Soehardjo, 1991, *Hukum Administrasi Negara Pokok-pokok Pengertian serta Perkembangannya di Indonesia*, Semarang , Badan Penerbit Universitas Diponogoro.

Soehino, 1984, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan.*, Yogyakarta, Liberty.

Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta

Sri Pudyatmoko.Y , 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, Grasindo.

W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Pradnya Paramita.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

### **Penulisan Hukum**

Marcus Lukman, 1996, Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional. Disertasi, Bandung, Universitas Padjadjaran.

Mas'udi, 2001, Negara Kesejahteraan dan Hukum Administrasi Negara, Dalam SF. Marbun dkk (eds), Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Adminitrasi Negara, Yogyakarta, UII Press.

Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Sjachran Basah, 1992, Perizinan di Indonesia, Makalah untuk Penataran Administrasi dan Lingkungan, Fakultas Hukum Unair Surabaya

Sjachran Basah, 1996, Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendalian Lingkungan, Makalah pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerja sama dengan Lagal Mandate Compliance and Enforcement Program dari BAPEDAL, 1.-2 mei 1996, Jakarta.

Suparto Wijoyo, 2005, Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (PeradilanTata Usaha Negara) Edisi Kedua, Surabaya, Airlangga University Press.

**Jurnal**

Abd Muis, 2016, Peran Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Kunjungan Wisata,  
Jurnal Media Hukum, Vol.4 No.2

Bagir Manan, 1996, Bentuk-bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat dilakukan  
oleh Pemerintah Daerah, Jurnal Media Hukum, Vol.14 No.3

Evy Urmilasari, 2013, Analisis Pelayan Perizinan di Badan Perizinan Terdapu  
dan Penanaman Modal Kota Makassar, Jurnal Media Hukum, Vol.6 No.1,  
ISSN:1979-5645

Herru Prasetya Widodo, 2011, Peranan Dinas Pariwisata dalam Mempromosikan  
Objek Wisata Guna Meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD), Jurnal Media  
Hukum, Vol.1 No.1

Imron Rosyadi, 2007, Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia, Jurnal  
Media Hukum, Vol.3 No.2, ISSN : 77-82

Ismayanti, 2014, Program Apresiasi Bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam  
Melaksanakan Tata Kelola (Good Governance) Guna Memajukan  
Kepariwisataan di Daerah, Jurnal Media Hukum, Vol.2 No.2

Ivan Fauzani Raharja, 2013, Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap  
Pelanggaran Perizinan, Jurnal Media Hukum, Vol.15 No.2, ISSN : 0852-  
8349

Ivan Fauzani Raharja, 2014, Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap  
Pelanggaran Perizinan, Jurnal Media Hukum, Vol.2 No.2

Kusno, 2017, Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah(ipt) untuk Pembangunan Hotel di Kabupaten Labuhan Batu, jurnal ilmiah advokasi, Vol.5 No.2, ISSN : 2337-7261

Nurwigati, 2010, Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan Dan Mewujudkan Fungsi Izin Sebagai Alat Pengendali Bagi Kegiatan Masyarakat Yang Membahayakan Lingkungan, Jurnal Media Hukum, Vol.17 No.1

Nurya Siswi Enggarani, 2016, Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali, Jurnal Media Hukum, Vol.1 No.1

Sanyoto, 2008, Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Media Hukum, Vol. 8 No.3

Sukei, 2017, Analisis Kepuasan Masyarakat pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto, Jurnal Media Hukum, Vol.1 No.2, ISSN : 2549-3604

### **Internet**

Bhekti Suryani, 2014, “Tertangkap Razia di Pantai Parangtritis, Sejumlah Pasangan Didenda Rp500.000”,  
<http://www.harianjogja.com/baca/2014/11/04/tertangkap-razia-di-pantai-parangtritis-sejumlah-pasangan-didenda-rp500-000-549430>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 13.30

- Damang, 2014, “Pengertian perizinan”  
[.http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html](http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html), Diakses  
pada tanggal 08 November 2017 pukul 13.20
- Irwan, 2013, “Metode Penelitian Hukum”,  
[http://irwaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-  
hukum.html?m=1](http://irwaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html?m=1), Diakses pada 29 Oktober 2017 pukul 20.10 WIB.
- IVVA, 2015, Keberadaan Sultan Ground Sebagai Dasar Pertanahan Keraton  
Kasultanan Di Indonesia, [http://ivaa-online.org/2015/04/16/keberadaan-  
sultan-ground-sebagai-dasar-pertanahan-keraton-kasultanan-di-indonesia-2/](http://ivaa-online.org/2015/04/16/keberadaan-sultan-ground-sebagai-dasar-pertanahan-keraton-kasultanan-di-indonesia-2/)  
diakses pada tanggal 2 April 2018 pukul 07.30
- Produk hukum Bantul, 2014, [https://hukum.bantulkab.go.id/hal/data/peraturan-  
daerah/201](https://hukum.bantulkab.go.id/hal/data/peraturan-daerah/201), Diakses pada tanggal 20 Maret 2018, pada pukul 21.58